

Brooke Nolan

Dayak *Keharingan* belief systems

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Agama Hindu Kaharingan¹ merupakan agama terbesar di Indonesia yang berasal dari kepercayaan kesukuan². Kaharingan diciptakan pada tahun 1957 dari unsur-unsur sejumlah kepercayaan dalam masyarakat Dayak³. Suku Dayak Ngaju merupakan suku asli paling besar di Propinsi Kalimantan Tengah. Sebagian besar masyarakat Dayak Ngaju tinggal di kampung-kampung di tepi sungai. Sejak tahun 1957, perkembangan agama Hindu Kaharingan dipermainkan oleh kekuatan-kekuatan dari pihak politik serta agama. Upacara paling menentukan dalam kehidupan penganut agama Hindu Kaharingan adalah Tiwah, yaitu upacara kematian terakhir. Upacara ini berlangsung paling sedikit tujuh hari dan paling lama tiga puluh tiga hari. Tujuan upacara ini adalah pengangkatan arwah orang yang meninggal ke surga agar dapat bersatu dengan nenek moyangnya serta *sangiang*⁴, makhluk halus. Di sinilah letak pentingnya upacara rumit ini. Identitas Dayak berhubungan erat baik dengan agama Hindu Kaharingan maupun dengan gagasan kekeluargaan.

Kepercayaan Kaharingan, yang kemudian dikenal sebagai agama Hindu Kaharingan, berangsur-angsur mengalami proses perubahan sesuai tuntutan dari Departemen Agama serta pihak lain dari luar masyarakat Kaharingan. Salah satu tujuan tulisan ini adalah menjabarkan perubahan

¹ Kaharingan merupakan suatu sistem kepercayaan hingga tahun 1980, ketika diakui sebagai agama, dan dengan demikian berada di bawah aturan Departemen Agama yang mengurus serta mengontrol semua hal-hal yang bersangkutan dengan agama termasuk kegiatan, upacara, pendidikan dan ritual.

² Baier, M. (2006). Perkembangan Sebuah Agama Baru di Kalimantan Tengah.

³ Schiller, A. (1996). An "Old" Religion in "New Order" Indonesia: Notes on Ethnicity and Religious Affiliation. *Sociology of Religion*, 57:4 409-417.

⁴ *Sangiang* adalah roh-roh tersuci yang tinggal di lapis langit yang paling tinggi bersama *Ranying Hatalla Langit* serta para malaikat dan dewa.

yang muncul akibat usaha pemerintah yang mengatur bentuk agama agar sesuai dengan patokan yang ditetapkan pemerintah sendiri.

Segala sistem kepercayaan serta agama tumbuh dalam lingkungan serta zaman yang tertentu. Kajian ini bermaksud mencermati perkembangan yang mengancam keberadaan upacara Tiwah di masa depan. Jika unsur-unsur tertentu yang membentuk pangkal pokok suatu masyarakat dapat dileburkan, dibatasi atau diubah oleh tokoh-tokoh dari luar masyarakat, berarti pusat kekuasaan masyarakat itu terletak di luar masyarakat tersebut.

Campur tangan pemerintah sejak tahun 1950 menjadi salah satu unsur yang mengubah arah perkembangan sistem kepercayaan Kaharingan. Sejak tahun 1950-an, meningkatnya pengaruh kelompok etnis Banjar yang beragama Islam di Propinsi Kalimantan Selatan mulai menjadi pokok persoalan besar dalam hubungan etnik serta keagamaan dengan kelompok Dayak Ngaju yang sebagian besar memeluk kepercayaan Kaharingan. Pada saat yang sama, mulai tumbuh keinginan dari berbagai suku Dayak untuk bersatu di bawah struktur pemerintahan yang terpisah dan lebih mengakomodasi kepentingan mereka.

Kebangkitan identitas Dayak tampaknya terjadi bersamaan dengan terbentuknya propinsi Kalimantan Tengah, yang pada saat itu secara geografis meliputi banyak wilayah berpenduduk suku-suku Dayak. Dorongan untuk membangun propinsi khusus Dayak untuk menghindari adanya ketegangan dengan kelompok-kelompok di luar masyarakat Dayak menuntut adanya penyaluran aspirasi politik masyarakat Dayak. Beraneka ragam kepercayaan animis yang kuno disatupadukan menjadi satu aliran kepercayaan yang dinamakan 'Kaharingan'⁵.

⁵ *'In the past, southern Bornean peoples engaged in mostly private ecstatic religious practices and an array of kin group-centered rituals. By the mid-1950s, this indigenous configuration of beliefs and practices had been*

Pada tanggal 20 Juli, 1950, *Sarikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI)* didirikan di Sampit, Kalimantan Tengah. SKDI merupakan salah satu lembaga utama yang mewadahi serta mewakili cita-cita pemeluk Kaharingan.⁶ Bersama dengan Gubernur Kalimantan Tengah pertama, Tjilik Riwut⁷, yang memahami pentingnya pelestarian kepercayaan Kaharingan, SKDI menciptakan visi dan misi untuk pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah⁸ yang berakar pada kebudayaan serta kepercayaan Dayak.

Pada tahun 1957 di tengah keresahan sosial yang diakibatkan ketegangan di antara suku Banjar dan Dayak mengenai kendali pemerintahan, Propinsi Kalimantan Tengah dibentuk.⁹ Tanah untuk membangun *Balai Induk Kaharingan*, tempat ibadah dan pusat kebudayaan Dayak yang pertama disediakan Gubernur Tjilik Riwut di Palangka Raya, ibu kota propinsi baru itu, pada tahun yang sama. Sebagian besar penduduk propinsi baru ini memeluk sistem kepercayaan Kaharingan, berbeda dengan penduduk propinsi Kalimantan Selatan yang sebagian besar merupakan suku Banjar yang beragama Islam. Tjilik Riwut mengusahakan kursi bagi wakil Kaharingan di *DPRD*¹⁰ disusun. Langkah-langkah tersebut memberikan dukungan besar terhadap upaya mempersiapkan Kaharingan untuk memperoleh pengakuan resmi dari negara.

Pada dekade 1960-an, *Majelis Agama Kaharingan Republik Indonesia (MAKRI)* serta *Badan Agama Kaharingan Dayak Indonesia (BAKDI)* dibentuk di Kalimantan Tengah. Pemimpin Kaharingan

given a name, Kaharingan.' - Schiller, A. (1996). An "Old" Religion in "New Order" Indonesia: Notes on Ethnicity and Religious Affiliation. *Sociology of Religion*, 57:4 409-417.

⁶ Hendrijani, A. et al., (2006). *Dayak dan Indonesia – Belajar dari Tjilik Riwut*. Yogyakarta, Indonesia: Galangpress.

⁷ Tjilik Riwut, dilahirkan di Kasongan, Kalimantan Tengah, pada tanggal 2 Februari 1918, menjadi pejuang, pendiri, dan Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah yang pertama. Setelah kematiannya pada tahun 1987, Riwut dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Untuk uraian yang cukup lengkap mengenai kehidupan Tjilik Riwut, lihat: Hendrijani, A. et al., (2006). *Dayak dan Indonesia – Belajar dari Tjilik Riwut*. Yogyakarta, Indonesia: Galangpress.

⁸ *Ibid.*

⁹ Schiller, A. (1996). An "Old" Religion in "New Order" Indonesia: Notes on Ethnicity and Religious Affiliation. *Sociology of Religion*, 57:4 409-417.

¹⁰ *DPRD* artinya *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

berupaya keras memenuhi segala syarat-syarat agama yang ditetapkan pemerintah. Agar dapat diterima sebagai Hindu Kaharingan, sejumlah unsur-unsur baru harus dimasukkan. Salah satu syarat adalah semua agama wajib berasaskan kitab suci serta Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pada tahun 1970an, kitab suci yang namanya '*buku suci panuturan*' diciptakan¹¹. Tuhan Yang Maha Esa dalam agama Hindu Kaharingan adalah *Ranying Hatalla Langit Jata Balawang Bulau*. Meskipun dalam risalahnya, Schiller¹² menyatakan bahwa,

'in the past, a supreme deity did not feature prominently in most people's religious understandings.'

Pada tahun 1967, Tjilik Riwut menjadi fungsionaris Golkar¹³ di Banjarmasin serta sekaligus memegang jabatan sebagai koordinator masyarakat suku Dayak se-Kalimantan¹⁴. Riwut berusaha menjalin hubungan yang erat antara *SKDI* dengan Golkar. Golkar mulai menyumbang dana untuk keberlangsungan *SKDI* pada tahun 1960an. Pada tahun 1971, Tjilik Riwut berhasil menjadi wakil Golkar dari Kalimantan di *DPR*¹⁵. Setiap tahun, jumlah dana yang diterima *MAKRI* serta *BAKDI* bertambah terus setelah Tjilik Riwut mendapat kursi di *DPR*. Golkar menjadi pendukung keuangan yang utama bagi lembaga-lembaga Kaharingan. Bahkan penerbitan '*Panaturan Tamparan Taluh Handiai*', buku pedoman keagamaan umat Kaharingan, serta pembinaan Balai Kaharingan yang membentang di lima belas kabupaten di Kalimantan Tengah dibiayai Golkar pada tahun 1973¹⁶.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Nama lengkap *Golkar* adalah *Golongan Karya*. Partai ini merupakan partai politik yang berkuasa pada zaman Orde Baru.

¹⁴ Hendrijani, A. et al., (2006). *Dayak dan Indonesia – Belajar dari Tjilik Riwut*. Yogyakarta, Indonesia: Galangpress.

¹⁵ *DPR* artinya *Dewan Perwakilan Rakyat*.

Hendrijani, A. et al., (2006). *Dayak dan Indonesia – Belajar dari Tjilik Riwut*. Yogyakarta, Indonesia: Galangpress.

¹⁶ *Ibid.*

Pada tahun berikutnya, *Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia (MBAUKI)* didirikan. Perjuangan *SKDI* untuk berhasil mendapatkan pengakuan resmi dari Departemen Agama dilanjutkan oleh majelis tersebut. Pada bulan Desember 1979, *Majelis Agama Hindu Kaharingan (MAHK)* mengambil alih peran *MBAUKI*. Sebelum dibubarkan, anggota-anggota *MBAUKI* mencapai persetujuan untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah agar Kaharingan diakui sebagai salah satu agama resmi. Kesepakatan ini menjadi langkah maju yang sangat menentukan bagi umat Kaharingan. Ketentuan pemerintah menyatakan bahwa penolakan terhadap 'agama baru' di luar lima agama yang saat itu diakui negara tetap menjadi kebijaksanaan pemerintahan. Menyusuli keputusan pemerintah tersebut, para wakil *MBAUKI* dianjurkan *Kanwil*¹⁷ *Departemen Agama Kalimantan Tengah* agar Kaharingan menginduk pada agama Hindu. Dengan kepercayaan pada banyaknya bentuk roh-roh, termasuk roh leluhur serta roh alami, Hindu dianggap sebagai agama yang paling mirip dengan Kaharingan. Saran tersebut kemudian diterima *MBAUKI*.

Menteri Agama Indonesia mengeluarkan *Surat Keputusan bernomor MA/203/1980* pada tanggal 28 April 1980. Surat tersebut berisi persetujuan peleburan umat Kaharingan ke dalam agama Hindu Dharma. Bahkan, Departemen Agama menasihatkan agar nama Majelis Agama Hindu Kaharingan menghilangkan kata 'Kaharingan' atau berubah menjadi '*Majelis Hindu Dharma*'. Pengakuan negara terhadap Hindu Kaharingan ini membuka peluang bagi pemerintah untuk mendikte lembaga-lembaga yang menaungi para penganut kepercayaan Kaharingan. Menteri Agama menuntut agar penghayatan serta pelajaran agama disesuaikan dengan ajaran agama Hindu. Penggeseran identitas keagamaan serta etnis yang telah diserap masyarakat Dayak sejak penggabungan berbagai aliran animis tahun 1950an, kini berada di bawah tuntutan dari Jakarta. Sejak saat itu, *Kepala Kanwil Departemen Agama* serta *Ditjen Bimas Hindu dan Budha* memegang kendali dan bertanggung jawab dalam menentukan perkembangan Kaharingan secara kelembagaan.

¹⁷ Kantor Wilayah.

Sebelumnya, telah saya ajukan uraian bahwa apabila pemimpin-pemimpin memutuskan untuk mengikuti tuntutan-tuntutan pemerintah tanpa syarat, artinya, pada masa depan, keputusan kunci akan dibuat di bawah kendali pemerintah. Manfaat-manfaat yang diperoleh dengan pengakuan resmi juga membawa kerugian. Meski demikian, pemimpin-pemimpin Kaharingan harus bertindak dalam batas-batas yang ditetapkan pemerintah. Wacana keagamaan antara Departemen Agama dan umat Kaharingan bercirikan ketidakseimbangan kekuasaan semenjak tahun 1950an. Mulai dari tahun 1980, kekuasaan untuk mengatur kegiatan Agama Hindu Kaharingan dipegang sepenuhnya oleh Departemen Agama di Jakarta.

Di bawah pemerintahan Orde Baru, Departemen Agama menetapkan bahwa setiap agama harus memenuhi persyaratan berikut: agama wajib berasaskan pada “ketuhanan” serta Kitab Suci atau sejenis naskah suci; suatu gedung khusus untuk pelayanan ibadah harus didirikan; dan agama resmi wajib mengakui beberapa hari keagamaan tahunan. *Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MBAHK)* kemudian memasukkan sejumlah penyesuaian di dalam Kaharingan agar dapat memenuhi segala syarat Departemen Agama. Tuhan Yang Maha Kuasa Kaharingan, yang menciptakan serta melengkapi dunia dan alam semesta, diberikan nama ‘*Ranying Hatalla Langit Jatha Balawang Bulau*’. Buku ‘*Panaturan. Tampan Taluh Handiai*’ yang artinya ‘Asal Muasal. Sumber Dari Semua Kehidupan’ menjadi kitab Suci Kaharingan. Dengan subsidi dari pemerintah Indonesia, gedung ‘*Balai Basarah*’ dibangun di Palangka Raya untuk pelayanan tetap umat Kaharingan. Kemudian, untuk memenuhi syarat keempat, tiga hari keagamaan ditetapkan *MBAHK*, yakni: Hari Pertanian, Hari Kebudayaan dan Hari Syukuran Umum. Tidak cukup hanya mengatur pembentukan serta perkembangan melalui keempat syarat tersebut pembentukan serta perkembangan agama Hindu Kaharingan melalui keempat syarat tersebut, pemerintah juga menyusun daftar peraturan mengenai pelaksanaan upacara kematian Tiwah.

Upacara Tiwah merupakan ritual kematian yang terbesar, terpenting dan termahal bagi penganut Kaharingan. Sebelum pendudukan Belanda, *jipen*¹⁸ dibeli di pasar perbudakan dan dikorbankan dalam upacara Tiwah. Pemerintah Belanda melarang kebiasaan ini pada tahun 1859¹⁹. Sebagai pengganti, kerbau boleh digunakan sebagai persembahan korban. Karena banyaknya hewan yang dikorbankan, biaya upacara Tiwah sangat mahal. Hewan yang dapat dikorbankan termasuk kerbau, ayam, sapi, kambing dan babi. Orang yang meninggal dunia membawa hewan korban dalam perjalanan ke tanah suci, yaitu *Gunung Lumut*²⁰, di mana *sangiang* dan roh leluhur menunggu. Karena biaya upacara kematian Tiwah sangat mahal, orang sering pindah masuk agama Kristen atau Islam yang upacara kematian serta ritual lain jauh lebih murah²¹. Dalam upacara Tiwah, roh orang yang telah meninggal diantarkan ke *Syurga Loka*²² agar dapat tinggal bersama dengan roh-roh leluhur. Pengikut upacara Tiwah harus mengikuti kepada sejumlah peraturan yang ditentukan pemerintah. Suatu jadwal yang menguraikan kegiatan-kegiatan dalam upacara Tiwah secara terperinci harus diajukan kepada Departemen Agama²³. Pemimpin upacara Tiwah wajib memperoleh surat izin dari polisi daerah sebelum upacara Tiwah boleh dilaksanakan.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin saya capai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan apa saja ancaman terhadap keberadaan serta masa depan upacara Tiwah.

¹⁸ *Jipen* artinya budak dalam bahasa Dayak Ngaju.

¹⁹ Baier, M. (2007). *Dari Agama Politeisme ke Agama Ketuhanan Yang Esa – Teologi Sistematis Agama Hindu Kaharingan*. Pontianak, Indonesia: Balai Penerbit Pontianak Amu Lanu.

²⁰ Penganut Kaharingan percaya bahwa Gunung Lumut merupakan gunung yang suci. Tuhan Kaharingan, *Ranying Hatalla Langit Jata Bulau Balawang* berasal dari Gunung Lumut.

²¹ Baier, M. (2007). *Dari Agama Politeisme ke Agama Ketuhanan Yang Esa – Teologi Sistematis Agama Hindu Kaharingan*. Pontianak, Indonesia: Balai Penerbit Pontianak Amu Lanu.

²² *Syurga Loka* artinya surga.

2. Untuk mengkaji perkembangan dalam masyarakat Dayak yang menempatkan hubungan kekeluargaan di atas pertalian agama.
3. Untuk menemukan penyebab mengapa generasi muda Dayak memilih masuk agama lain umpamanya Protestan, Katolik dan Islam.
4. Untuk menganalisis keadaan terkini dari ketegangan antara masyarakat Kaharingan dan pemerintah.
5. Untuk menguraikan pengaruh dari luar masyarakat Dayak terhadap upacara kematian Tiwah.

1.3 Manfaat Penelitian

Dilihat dari perspektif yang lebih luas, penyelarasan antara “tradisi yang kecil” dan “tradisi yang agung” kini terjadi di seluruh dunia. Kebudayaan-kebudayaan yang dahulu terpencil sedang menghadapi globalisasi dan pengaruh dari agama-agama dunia yang lebih kuat. Hasil yang penting dari interaksi dan hubungan-hubungan ini adalah munculnya identitas keagamaan yang diperbarui. Penelitian ini bermanfaat untuk membangun pemahaman lebih dalam antar kebudayaan, kepercayaan dan agama-agama yang berbeda di Kalimantan terutama dalam masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan sosial dengan penitikberatan kepada antropologi keagamaan. Dengan mencermati peranan nilai kekeluargaan, kajian ini dapat memberikan uraian mengenai kemajemukan masyarakat Dayak Ngaju.

Bab II

Kajian Pustaka

2.1: Pengertian Upacara

Ahli antropologi Perancis, R. Hertz, mempelajari sebagian besar bahan etnografi yang didasarkan pada upacara kematian dari Indonesia, terutama bermacam-macam upacara di Kalimantan²⁴. Hertz memahami upacara kematian sebagai kegiatan yang diselenggarakan setelah kematian seseorang yang diatur dalam adat-istiadat. Upacara ini menuntut keikutsertaan kolektif. Hertz melihat bahwa peristiwa kematian memiliki dampak yang luas terhadap perilaku masyarakat Dayak dipengaruhi oleh peristiwa upacara kematian. Hertz dan sosiolog Perancis terkenal, E. Durkheim, menamatkan bahwa perilaku sebagian besar anggota masyarakat Indonesia banyak ditentukan oleh gagasan kolektif dalam masyarakat itu²⁵. Kematian dipahami sebagai proses perpindahan dari suatu kedudukan sosial dalam dunia yang fana ini ke suatu kedudukan sosial di alam arwah²⁶. Di samping itu, riset Hertz menggarisbawahi bahwa pada umumnya upacara berdasarkan pada lima unsur, yaitu²⁷:

1. Masa kegentingan atau masa penuh ancaman gaib muncul pada saat nyawa beralih dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain. Bahaya yang terletak di sini dapat mempengaruhi seluruh masyarakat yang bersangkutan;
2. Kerabat orang yang meninggal serta jenazah itu sendiri dianggap memiliki sifat suci (*sacre*);
3. Pergeseran ke kedudukan sosial yang baru merupakan proses yang berjenjang;

²⁴ Koentjaraningrat (2007). *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta, Indonesia: Penerbit Universitas Indonesia.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

4. Sifat bahwa ketiga tahap adalah, pertama, tingkat yang membebaskan roh itu dari kaitannya dengan lingkungannya yang lama; kedua, tingkat yang menyiapkannya menghadapi kedudukan serta lingkungan yang baru, dan tingkat yang mengantarnya masuk ke lingkungan baru;
5. Roh itu harus menjalani prosesi pengukuhan melalui sejumlah upacara ilmu gaib karena roh tersebut memiliki sifat yang lemah.

Dalam penelitian saya, poin ketiga serta poin keempat merupakan poin yang paling penting dari ketiga poin ini.

Seperti tercantum dalam uraian Hertz, penyelenggaraan upacara kematian bersusun tiga merupakan ciri khas sejumlah suku bangsa Indonesia. Pengamatan ini sejalan dengan upacara Tiwah. Upacara Tiwah merupakan tingkat yang terakhir²⁸ dalam upacara kematian.

Dalam masyarakat Dayak, upacara berfungsi sebagai sumber kerukunan serta kepaduan sosial. Pentingnya upacara semakin diperkuat oleh nilai-nilai kekeluargaan yang kokoh. Anggota keluarga wajib hadir dan ikut serta dalam upacara di kampung halamannya. Sejumlah unsur yang bergabung membentuk teori sistem upacara dilukiskan dalam riset Hertz. Dengan merujuk kepada ritual yang menggambarkan teori upacara Hertz, pengertian mengenai kebudayaan Dayak yang lebih mendalam dapat diperoleh.

2.2: Pengertian Ritual

²⁸ Tahap terakhir dalam karya Hertz dikenal sebagai *ceremonie finale*, 'Kedudukan yang baru untuk roh yang meninggal itu dicapai pada *ceremonie finale*, yaitu pada upacara di mana tulang-belulang dan sisa-sisa jasmani orang yang meninggal itu digali lagi (...) lalu ditempatkan di pemakamannya yang tetap. Kecuali itu ada upacara yang maksudnya meresmikan kedatangan roh orang yang meninggal itu di antara para roh nenek-moyangnya di dunia mahluk halus. Sedangkan bagi kaum kerabat yang masih hidup ada upacara yang maksudnya mengahlikan mereka itu dari keadaan mereka yang *sacre* ke keadaan yang biasa kembali di dalam kehidupan sosial sehari-hari.' (Koentjaraningrat 2007: 73)

Antropolog Inggris, Victor Turner, mencurahkan banyak perhatiannya terhadap pentingnya ritual dalam masyarakat Ndembu dan Nyakyusa di Afrika bagian selatan²⁹. Dalam pemahaman Turner, ritual mengandung simbol yang bermakna. Ritual mewakili nilai-nilai yang paling menonjol dalam masyarakat. Dengan demikian, sikap serta tindak-tanduk manusia dapat diubah melalui pelaksanaan ritual. Turner memahami simbol sebagai 'expressive phenomena'³⁰ Berkenaan dengan definisi ritual Turner, pernyataan ritual merupakan perwujudan kepercayaan pada para makhluk gaib. Dalam pengertian Turner, ritual serta simbol berasal dari perumpamaan.³¹ Deflem mengemukakan bahwa Turner melihat ritual sebagai salah satu unsur dalam proses penyatuan masyarakat.³² Demikian juga dalam perspektif Gluckman yang melihat ritual sebagai unsur yang berguna dalam pemeliharaan keseimbangan sosial.³³ Ritual memainkan peranan penting dalam upacara Tiwah. Bahkan, menurut pendapat Geertz, ritual yang terdapat dalam upacara memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap gambaran agama mereka serta kepercayaan terhadap alam baka yang akan

²⁹ *Turner (1967: 19) defined ritual as "prescribed formal behaviour for occasions not given over to technological routine, having references to beliefs in mystical beings and powers." (...) Ritual, religious beliefs and symbols are in Turner's perspective essentially related. (...) Ritual is "a stereotyped sequence of activities involving gestures, words, and objects, performed in a sequestered place, and designed to influence preternatural entities or forces on behalf of the actors' goals and interests"* (Turner 1977a: 183). - Deflem, M. (1991). *Ritual, Anti-Structure and Religion: A Discussion of Victor Turner's Processual Symbolic Analysis. Journal for the Scientific Study of Religion* 30(1): 1-25.

³⁰ Arti ungkapan itu adalah 'kejadian yang bersifat menyatakan perasaan'.

Fernandez, J. & Turner, V. (1973). *Analysis of Ritual: Metaphoric Correspondences as the Elementary Forms. Science, New Series, Vol. 182, No. 4119, pp. 1366-1368.*

³¹ *'Metaphor, not symbol, should be considered the basic analytic unit of ritual because ritual and ritual symbols spring from metaphor. (...) A metaphor is an image predicated upon a subject by virtue of some sense of apt correspondence perceived in the culture, and it is this image which is efficacious in the subject's experience and in planning his performance in the ritual process.'* Ibid.

³² *'Rituals, (...) were treated by Turner as merely the "social glue" that holds Ndembu society together.'* - Deflem, M. (1991). *Ritual, Anti-Structure and Religion: A Discussion of Victor Turner's Processual Symbolic Analysis. Journal for the Scientific Study of Religion* 30(1): 1-25.

³³ *'In Gluckman's functionalist approach, the role of rituals is to sustain a society's equilibrium and to secure solidarity among its members. Rituals are looked upon as mechanisms to ensure social unity' - Ibid.*

dialami arwah sudah diangkat ke surga³⁴. Asad mengakuri pandangan Geertz dengan pernyataan bahwa:

*'ritual cannot be the place where 'religious faith' is attained, but where it is (literally) played out and confirmed.'*³⁵

Gellner menunjukkan bahwa menurut kesimpulan Geertz, ritual mengandung pesan yang jelas. Berlawanan dengan pandangan Geertz, Bloch menguraikan bahwa pesan yang terdapat dalam ritual tidak pernah dapat dipahami dengan jelas³⁶.

Dalam karyanya, Maurice Bloch, antropolog Inggris, menegaskan pentingnya ritual serta simbolisme. Keanekaragaman pandangan terhadap ritual muncul akibat kerumitan ritual tersebut.³⁷ Di sinilah terletak kekuatan serta pentingnya ritual. Ketiga tahap³⁸ upacara kematian Tiwah dapat disamakan dengan susunan ritual bertingkat tiga yang dibahas dalam kajian Van Gennep. Tiwah dapat dijabarkan dengan menggunakan dalam model Van Gennep, terutama tahap ketiga di mana

³⁴ *'Consistent with previous arguments about the functions of religious symbols is Geertz's remark that 'it is in ritual – that is, consecrated behaviour – that this conviction that religious conceptions are veridical and that religious directives are sound is somehow generated' (1973: 112).'* Asad, T. (1983). *Anthropological Conceptions of Religion: Reflections on Geertz. Man, New Series, Vol. 8, No. 2*, pp. 237–259.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *'Whereas Geertz insists that the ritual has a clear message – that the king is close to the gods – Bloch argues that the message can never be entirely clear: its fuzziness is of the essence.'* - Gellner, D. (1999). *Religion, politics, and ritual. Remarks on Geertz and Bloch. Social Anthropology, Vol. 7, No. 2*, 135-153.

³⁷ *'Ritual should not be seen simply as doing something social (the functionalist position). Nor should it be seen either as expressing something (the symbolicist position), or as saying something (the intellectualist position). Rituals, he remarks, lie 'somewhere between an action and a statement' (1986: 10); thus they cannot be reduced either to the one or to the other. Rituals certainly 'do', 'express', and 'say' things, but they do so ambiguously, and this ambiguity is of the essence. The ambiguity permits different and opposed levels of understanding among those who share allegiance to the same ritual.'* – *Ibid.*

³⁸ *Ketiga tahap ritual yang diciptakan Van Gennep termasuk: '1. Separation or the preliminal (after limen, Latin for threshold), when a person or group becomes detached from an earlier fixed point in the social structure or from an earlier set of social conditions; 2. Margin or the liminal, when the state of the subject is ambiguous; he is no longer in the old state and has not yet reached the new one; and 3. aggregation or the post-liminal, when the ritual subject enters a new stable state with its own rights and obligations (Turner 1967: 94; 1968b: 567-577).'* - Deflem, M. (1991). *Ritual, Anti-Structure and Religion: A Discussion of Victor Turner's Processual Symbolic Analysis. Journal for the Scientific Study of Religion 30(1): 1-25.*

arwah masuk ke keadaan yang baru, yaitu *Syurga Loka*. Agama Kaharingan memang berasaskan pada tahapan. Pada umumnya, agama yang bertingkat-tingkat cenderung dilihat mengandung unsur-unsur sinkretisme.

2.3: Pengertian Sinkretisme

Sebagaimana diusulkan Rutherford dalam '*After Syncretism: The Anthropology of Islam and Christianity in Southeast Asia*' (2002), pengabar Injil dari Eropa serta pejabat negara pada awal abad ke-duapuluh menyebutkan bahwa penduduk asli Asia Tenggara masih bercirikan oleh sistem kepercayaan yang bersifat sinkretistik. Sinkretisme tersebut menjadi pembenaran bagi pengabar Injil untuk melanjutkan usahanya mengkristenkan penduduk asli³⁹. Dalam pandangan pengabar Injil serta pejabat negara, hanya agama yang monoteistik dapat diakui sebagai agama yang benar.

2.4: Pengertian Agama

Menurut pendapat Gellner, sebelum sinkretisme dan ritual dapat diuraikan, harus ada pengertian yang jelas mengenai agama⁴⁰. Dalam pandangan Gellner, definisi agama berasal dari kebudayaan Yahudi-Kristen. Selama berabad-abad terjadi kesalahpahaman mengenai agama Asia disebabkan oleh pandangan Barat mengenai agama. Kategori 'agama dunia' dikecam sebagai gagasan yang mengada-ada. Berusaha memahami agama Asia seperti Hindu, Shinto serta Budha dengan kacamata 'agama dunia' yang berasal dari tradisi Kristen-Yahudi adalah langkah yang keliru. Nilai-nilai, kitab suci, nabi, upacara serta ritual agama Asia seharusnya dibiarkan tumbuh tanpa tekanan dari pengertian agama yang berasal dari golongan Kristen-Yahudi⁴¹.

³⁹ 'The claim that the natives remained syncretistic – and not yet civilised – justified the missionaries' and officials' never-ending work.' - Rutherford, D. (2002). *After Syncretism: The Anthropology of Islam and Christianity in Southeast Asia. Society for Comparative Study of Society and History.*

⁴⁰ Gellner, D. (1999). Religion, politics, and ritual. Remarks on Geertz and Bloch. *Social Anthropology, Vol. 7, No. 2*, 135-153.

⁴¹ *Ibid.*

